

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang upaya komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas terkait peningkatan kesejahteraan sosial anak:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Nurkholis tahun 2014 tentang *Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk Anak Rentan Domore*. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan : (1) Proses PKSA dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan DoMore dalam pelaksanaan PKSA; (2) manfaat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) untuk anak rentan jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kegiatan yang dilakukan Yayasan DoMore dalam pelaksanaan PKSA adalah; a. assesment kebutuhan anak yang dibagi menjadi dua macam kegiatan, yaitu edukasi dan non edukasi. Kegiatan edukasi meliputi rekreasional, pendidikan kecakapan hidup (lifeskill), kunjungan keluarga, calistung, dan sosialisasi hak anak, sedangkan non edukasi meliputi pemberian tabungan dan kebutuhan anak; b. pelaksanaan PKSA dilakukan dengan kegiatan edukasi dan non edukasi dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga (family-centered intervention), yaitu penanganan yang difokuskan pada pemberian bantuan

sosial atau pemberdayaan keluarga; c. evaluasi, dilakukan dengan memantau penggunaan kebutuhan yang telah dibeli dengan datang ke rumah anak penerima bantuan; (2) manfaat PKSA untuk anak rentan jalanan adalah; (a) manfaat dalam kesehatan adalah menjadikan anak lebih memperhatikan pola hidup sehat dan menumbuhkan gaya hidup sehat anak; (b) manfaat dalam pendidikan adalah menjadikan anak termotivasi untuk sekolah dan lebih giat belajar; (c) manfaat PKSA dalam kehidupan sosial anak adalah terjalin komunikasi yang baik antara anak dengan orangtua dan teman sebaya. Diperlukan kontinuitas program kesejahteraan supaya anak tetap merasakan manfaat dari program kesejahteraan untuk anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Permataningtyas pada tahun 2016 tentang *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak “Berbasis Keluarga”*. Menghasilkan kesimpulan bahwa dalam mengupayakan kesejahteraan sosial anak berbasis keluarga LKSA Harum Malang membantu keluarga dalam melaksanakan perannya sebagai orang tua yaitu mengakses anaknya dalam hal pendidikan sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi. Adapun peran LKSA Harum Malang yaitu sebagai fasilitator, konselor, penghubung, dan pembimbing sosial kelompok.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susilowati tahun 2017 tentang *Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Malang*. Menghasilkan kesimpulan bahwa Dinas Sosial mengacu pada tiga hal untuk mengentaskan permasalahan anak jalanan yaitu pertama, fungsi pencegahan dilakukan

dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerja sama dengan LSM ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Kedua, fungsi rehabilitasi. Anak jalanan yang hasil razia Operasi Simpatik kemudian di data dan ditampung di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) yaitu tempat yang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia. Dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal ini diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dysa Restiani tahun 2014 berjudul; *Strategi Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Pendampingan Luar Keluarga* (Studi kasus di Development Center For Street Children, Bambu Apus Jakarta Timur) menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam pendampingan luar lembaga, pihak dari lembaga memberikan beberapa pelayanan seperti kesehatan, test psikologi, FDS, dan memberikan uang pendidikan untuk anak. Program pendampingan luar lembaga mengajarkan orang tua bagaimana cara mengasuh anak yang benar, dan memberikan arahan kepada orang tua agar tidak membiarkan anaknya turun kejalanan lagi. Manfaat yang diberikan dari pendampingan luar lembaga ini membuat anak yang putus sekolah karena ekonomi dan memutuskan untuk mencari uang di jalanan menjadikannya bisa bersekolah lagi.

5. Penelitian oleh Kurniyadi tahun 2014 yang berjudul *Pembinaan Anak Jalanan Melalui Lembaga Sosial* (Studi Kasus Pembinaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Yayasan Bina Anak Pertiwi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan), hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi, tampak perubahan pada diri anak-anak tersebut. Dengan adanya pembinaan tersebut, mereka lebih mempunyai arah dan tujuan hidup. Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Yayasan Bina Anak Pertiwi meliputi : *pertama*, Pembinaan keterampilan dan skill. Bentuk pembinaan ini sebagai upaya untuk memberikan anak jalanan softskill supaya nantinya mereka bisa menjadi anak yang mandiri. *Kedua*, Pembinaan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat. *Ketiga*, Pembinaan yang melibatkan pihak kepolisian. *Keempat*, Program pendidikan. Pendekatan ini melalui kegiatan pendidikan melalui kejar paket dan kegiatan rekreasi. *Kelima*, pembinaan keagamaan. Yaitu sebagai usaha preventif untuk menangkal sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. *Keenam*, Pembinaan kesehatan yang melibatkan dinas kesehatan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil
1	Dian Nurkholis 2014	Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk Anak Rentan Domore	Untuk mendeskripsikan manfaat PKSA dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan DoMore dengan anak rentan jalanan	Jangka waktu pemberian dana sosial PKSA masih sering terlambat sehingga pelaksanaan sering tertunda dan tidak optimal
2	Yuni Permataningtyas 2016	Upaya Peningkata Kesejahteraan Sosial Anak 'Berbasis Keluarga'	Skripsi ini menjelaskan tentang upaya LKSA Harum Malang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak.	Menghasilkan kesimpulan bahwa LKSA Harum Malang membantu keluarga dalam melaksanakan perannya sebagai orang tua yaitu mengakses anaknya dalam pendidikan sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi.
3	Dwi Susilowati 2017	Kebijakan Penanggulang an Anak Jalanan di Kota Malang	Untuk mengidentifikasi profil anak jalanan di kota malang dan merumuskan konsep penanggulangan nya	Ada 3 tahap yang dilakukan Dinsos dalam mengatasi masalah anak jalanan yaitu fungsi pencegahan dengan sosialisasi, kedua, fungsi rehabilitasi dan yang ketiga fungsi pemberdayaan.

4	Dysa Restiani 2014	Strategi Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Pendampingan Luar Lembaga	Untuk mengetahui pelayanan apa saja yang diberikan oleh Social Development For Street Children, Bambu apus-Jakarta Timur	Menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam pendampingan luar lembaga, pihak dari lembaga memberikan beberapa pelayanan seperti kesehatan, test psikologi, FDS, dan memberikan uang pendidikan untuk anak
5	Kurniyadi 2014	Pembinaan Anak Jalanan Melalui Lembaga Sosial	Untuk mendeskripsikan pola pembinaan anak jalanan yang diberikan di Yayasan Bina Anak Pertiwi	Lembaga Sosial Yayasan Bina Anak Pertiwi masih kurang aktif dalam memberikan pembinaan bagi anak jalanan karena menemukan banyak kendala dan kurangnya dukungan dari masyarakat

Sumber : Diolah dari 5 penelitian terdahulu

Berdasarkan 5 penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya dan peran Save Street Child Malang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan di bidang pendidikan berbasis komunitas dan seperti apa program-program Save Street Child Malang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya guna meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan.

2.2 Konsep Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Definisi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak jalanan menurut Bagong Suyanto (2010:199) yaitu anak jalanan adalah, “anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat”. Anak jalanan melakukan aktivitas di sektor informal seperti menjual koran, menjadi pemulung, mengemis, dan mengamen untuk mencari penghasilan sendiri yang digunakan untuk bertahan hidup. Di dalam buku yang diterbitkan oleh YLPS Humana menyebutkan bahwa yang disebut anak jalanan adalah anak yang hidup selama 24 jam di jalan dan tidak pulang ke keluarganya, istilah tersebut mengacu pada gelandangan anak. Anak melakukan segala aktifitasnya di jalan. Anak jalanan tidak kembali lagi ke keluarganya disebabkan karena kondisi keluarga yang kurang nyaman bagi anak. Bagong Suyanto (2010:185) menjelaskan kondisi anak jalanan sebagai

anak marginal karena jenis pekerjaan mereka yang tidak jelas dan kurang dihargai oleh orang lain. Ada anak jalanan yang bekerja di jalan tetapi masih pulang ke rumah bertemu keluarganya lagi, ada anak jalanan yang memang hidup dan berpartisipasi penuh di jalan, ada juga anak jalanan yang memang dari kecil berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Tujuan mereka hidup dan bekerja di jalan adalah sebagai penopang ekonomi keluarganya, sedangkan tujuan daripada kategori anak yang berpartisipasi penuh di jalan umumnya adalah pelarian dari keluarga mereka, karena kekerasan maupun broken home.

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Menurut Pujileksono dan Lendriyono (2008:175) menjelaskan anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah di jalanan, pusat kegiatan ekonomi dan pusat keramaian. Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah seseorang laki-laki maupun perempuan yang berumur maksimal 18 tahun dan menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalan, untuk bekerja atau

hidup di jalan, termarginalkan dan biasanya jauh dari perlakuan kasih sayang. Mereka tidak lagi kembali kepada keluarganya, aktifitas di jalan dilakukan untuk mencari penghasilan sendiri yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya.

2. Kriteria Anak Jalanan

Pada awal 1990-an, gelandangan anak menjadi isu yang sering di perbincangkan. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) melakukan penelitian tentang kelompok gelandangan anak. Penelitian ini mulai menggunakan istilah anak jalanan untuk menyebut kelompok gelandangan anak. Penelitian tersebut membedakan dua kelompok anak jalanan, yaitu anak yang hidup di jalan (*children of the street*) dan anak yang bekerja di jalan (*children on the street*). Menurut Soedijar, 1954 dalam Bagong Suyanto (2010:201) *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerjaan anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya sedangkan *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Kriteria untuk anak jalanan adalah anak dengan batas usia maksimal 18 tahun dengan dua kategori, yaitu anak yang bekerja di jalan tetapi masih pulang ke rumah bertemu keluarganya dan anak yang menghabiskan waktunya untuk bekerja dan hidup di jalan tetapi

tidak pulang ke rumah dan tidak bertemu dengan keluarganya lagi. Edi Suharto (2014:231) menyebutkan karakteristik anak jalanan sebagian besar adalah remaja berusia belasan tahun, dan tidak sedikit berusia di bawah 10 tahun. Anak jalanan bertahan hidup dengan aktivitas di sektor informal seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang bekas, mengemis, mengamen, sampai ada yang mencuri, mencopet, dan terlibat perdagangan sex.

3. Problematika Sosial Anak Jalanan

Anak jalanan tidak lepas dari permasalahan. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Permasalahan anak jalanan antara lain kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun temannya sendiri (berkelahi), tingkat pendidikan yang rendah, identitas diri yang belum jelas (seperti belum terdaftar dalam kartu keluarga, KTP, dan sejenisnya), tempat tinggal yang tidak permanen dan belum legal, eksploitasi untuk bekerja, drop out sekolah, dan lain sebagainya. Direktur executive Yayasan DoMore Christina Hera parwati menjelaskan bahwa ada perubahan sosial yang terjadi pada anak jalanan sejak tahun 1990-an sampai 2013, “Pada tahun 1990-an rasa perkawanan yang erat antar anak jalanan, persaudaraan karena senasip meski berbeda lokasi/ luar daerah, luarkota bahkan luar pulau masih kental, sedangkan pada tahun 2013, permasalahan mereka adalah ekonomi dan gaya hidup.

Pengaruh media untuk memperoleh pengakuan secara sosial bahwa mereka mampu, keren dan sebagainya jika memiliki HP bagus, pakaian bagus, sepatu keren, sepeda motor keren sehingga orang tua pun cenderung lebih suka anaknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan “tersier” nya daripada memikirkan kebutuhan primer termasuk pendidikan dan kesehatan”. Kondisi hidup di jalan yang relatif keras dan banyak sekali tekanan dari lingkungan sekitar cenderung mengarahkan mereka untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan makan saja dengan mengesampingkan kebutuhan primer lainnya seperti pendidikan maupun kesehatan. YLPS Humana menjelaskan ada beberapa resiko menjadi anak jalanan, antara lain menjadi korban operasi tertib sosial. Anak jalanan merasa takut dengan operasi tertib sosial apalagi melibatkan kepolisian, militer yang dikenal dengan operasi gabungan. Anak menjadi korban kekerasan orang dewasa seperti kekerasan fisik ditendang dan dipukul, serta mendapat ejekan atau hinaan. Kondisi anak jalanan yang lain adalah kehilangan pengasuhan, resiko penyakit atau gangguan kesehatan, kehilangan kesempatan pendidikan, eksploitasi seksual, dan konflik dengan hukum. Secara singkat problematika sosial anak jalanan menurut beberapa pendapat di atas antara lain kekerasan yang dilakukan oleh temannya sendiri atau orangtua, tingkat pendidikan yang rendah, identitas diri yang belum jelas, tempat tinggal yang tidak tetap, eksploitasi untuk bekerja, gaya hidup yang salah dan mementingkan kebutuhan tersier saja tanpa mementingkan kebutuhan primer (pendidikan, kesehatan, identitas, tempat tinggal layak, dan

lain-lain), resiko penyakit dan gangguan kesehatan, korban operasi tertib sosial, sampai konflik dengan hukum.

4. Macam-Macam Hak anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan hak-hak anak. Di dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak”. Secara garis besar hak-hak anak dalam deklarasi tersebut antara lain :1) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus Anak harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. 2) Hak untuk memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir. Anak mendapatkan hak untuk diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan sendiri sejak lahir. 3) Hak mendapatkan jaminan sosial. Anak berhak mendapatkan jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, hak tempat tinggal yang layak, hak rekreasi dan pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, hak untuk tumbuh kembang dalam suasana yang penuh kasih sayang. Profil Anak Indonesia 2012 hasil kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik diakses dari (<http://www.ykai.net>) menerangkan, “Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konfensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya

dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990". Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa anak mempunyai hak antara lain perlindungan khusus, memiliki identitas yang jelas seperti nama dan akte kelahiran, anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dan kebangsaan, serta hak untuk memperoleh jaminan sosial.

2.3 Konsep Kesejahteraan Sosial Anak

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 : “ Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri

sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial Menurut Walter Friedlander dalam Isbandi Rukminto (2001:26) “Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan”. Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial yaitu keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konsteksosialnya. Di dalamnya tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan; jaminan sosial; kesehatan; perumahan; pendidikan; rekreasi; tradisi budaya; dan lain sebagainya”

Menurut PERDA Kota Malang No. 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menyebutkan pengertian kesejahteraan sosial yang tertulis dalam pasal 1 yaitu Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial. Kesejahteraan Sosial dapat didefinisikan Dari berbagai definisi diatas sekurang-kurangnya dapat ditangkap pengertian

kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial ekonomi, maupun kehidupan spiritual. Terdapat empat cara pandang kesejahteraan sosial menurut Isbandi Rukminto (2001:24-26), yaitu sebagai berikut:

1. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan (kondisi)
2. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu
3. Kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang kegiatan, dan
4. Kesejahteraan sosial sebagai suatu gerakan

Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu merupakan terbitnya suatu hal yang baru pada awal abad ke-20 dan salah satu ciri dari ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi (termasuk didalamnya aspek strategi dan teknik) untuk menangani berbagai masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat (baik lokal, regional, ataupun internasional). Kesejahteraan sebagai suatu bidang kegiatan dan gerakan merupakan suatu gerakan yang memiliki tujuan bahwa masalah-masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh dunia, baik secara global maupun parsial. Oleh sebab itu, banyak bermunculan gerakan-gerakan dalam wujud organisasi lokal, regional maupun internasional yang berusaha menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial tersebut. Perhatian masyarakat akan taraf hidup yang lebih baik dari warganya diwujudkan dengan penyediaan berbagai bentuk usaha kesejahteraan sosial yang kongkret. Usaha kesejahteraan sosial ini mengacu pada program pelayanan dan

berbagai kegiatan secara kongkret (nyata) berusaha menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, kesejahteraan sosial tidak akan ada maknanya jika tidak diterapkan dalam bentuk usaha kesejahteraan sosial yang nyata dimana menyangkut kesejahteraan masyarakat. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari dampak dari perubahan sosial yang termasuk didalamnya adalah efek dari urbanisasi dan industrialisasi. Konsep kesejahteraan sosial menurut Nasikun (1993:54) dapat dirumuskan sebagai makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), (4) Jati diri (identity)

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989: 44), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: 1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya; 2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya; 3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya; 4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989: 45), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup dan sebagainya, (2) dengan melihat pada

tingkat mentalnya, (mental/ educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (social status). Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004: 33). Menurut Thelma Lee Mendoza dalam Isbandi Rukminto (2001:8) terdapat tiga tujuan utama yang terkait dengan kesejahteraan sosial (yang pada umumnya berhubungan dengan upaya memperoleh sumber daya yang terbatas):

1. Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial (humanitarian and social justice goals) Tujuan kesejahteraan sosial ini berakar dari gagasan ideal demokratik mengenai keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Meskipun potensi tersebut kadang kala tertutup karena adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, psikis, dan berbagai faktor lainnya yang menghambat dirinya untuk mengenali potensi yang ia miliki. Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak diarahkan pada upaya pengidentifikasikan kelompok yang paling mempunyai

ketergantungan; kelompok yang paling terlanjar; ataupun kelompok yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, dan menjadikan mereka kelompok sasaran dalam kaitannya dengan upaya menjembatani sumber daya yang langka.

2. Tujuan yang berkaitan dengan pengendalian sosial (social control goal)

Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya dapat melakukan “serangan” (baik secara individu atau kelompok) terhadap masyarakat (terutama yang sudah mapan). Oleh karena itu masyarakat tersebut harus berupaya untuk “mengamankan” diri dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan; pemilikan; maupun stabilitas politik yang sudah berjalan. “Ancaman” seperti ini biasanya dimunculkan oleh kelompok yang kurang mempunyai kesempatan dan sumber daya untuk mendapatkan taraf hidup yang memadai. Usaha kesejahteraan sosial yang diberikan pada pelaku “kejahatan” baik remaja maupun dewasa merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pengendalian sosial dari kesejahteraan sosial.

3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi (Economic Development Goal)

Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan yang diberikan, ataupun berbagai sumber daya lain yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi.

Ciri-ciri masyarakat sejahtera:

1. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya;
2. Memiliki tempat tinggal yang layak;
3. Dapat bersekolah;
4. Masyarakatnya mandiri.

Dari penjelasan di atas mengenai kesejahteraan sosial, dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia yang di dalam mencakup pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat dikatakan sejahtera ketika mereka dapat hidup mandiri, memiliki tempat tinggal yang layak, dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya seperti dapat bersekolah, beribadah dan juga dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dalam kesejahteraan sosial tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan anak sangat penting, karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 4 1979 tentang kesejahteraan anak : Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi, atau mengganti fungsi orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan merubah institusi-institusi sosial yang ada atau membentuk institusi

baru. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak diarahkan untuk membantu memecahkan masalah anak yang berhubungan dengan ketergantungan anak, kemiskinan, keterlantaran anak, atau kenakalan anak, dan lain sebagainya. Pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan memberikan pertolongan terhadap orang tua dirumahnya sendiri, maupun dalam institusi yang satu dengan yang lain saling bekerjasama, dimana pelayanan ini bertujuan untuk memperkuat, memberdayakan, dan membangun keluarga dengan sumber-sumber yang ada.

Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian halnya juga dengan anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksplotasi dan beresiko tereksplotasi secara ekonomi dan seksual dimana salah satunya adalah anak jalanan yang merupakan bagian dari anak-anak yang mengalami kesejahteraan, adalah anak-anak yang juga membutuhkan perhatian, bimbingan serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana anak Indonesia lainnya. Kesejahteraan anak merupakan bidang khusus dalam profesi kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan masalah-masalah kesejahteraan anak, mengenai kurangnya serta ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai akibat kemiskinan dan adanya interaksi yang kurang memadai didalam keluarga, maka perlindungan anak sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan anak.

1. Program Kesejahteraan Sosial Anak

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak. PKSA ini meliputi : bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orangtua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Tujuan dari PKSA adalah untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Sasaran PKSA adalah:

- (1). Anak balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar meningkat prosentase terhadap akses pelayanan sosial dasar.
- (2). Orangtua dan keluarga yang bertanggungjawab dalam pengasuhan dan perlindungan kepada anak meningkat prosentasenya.
- (3). Penurunan prosentase anak yang mengalami masalah sosial.
- (4). Lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
- (5). Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial di bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak yang terlatih meningkat.

(6). Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) yang bermitra dan berkontribusi melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam pelaksanaan PKSA.

(7). Produk hukum perlindungan hak anak yang diperlukan untuk landasan hukum pelaksanaan PKSA. (Kemensos RI, 2016)

Kriteria Penerima Program. Penerima manfaat program ini diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Prioritas penerima manfaat dibagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi:

- (1). Anak balita terlantar dan/atau membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah).
- (2). Anak telantar/tanpa asuhan orangtua (6 – 18 tahun), meliputi: anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga.
- (3). Anak terpaksa bekerja di jalanan (6-18 tahun) meliputi: anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, anak yang bekerja dan hidup di jalanan.
- (4). Anak berhadapan dengan hukum (6 – 18 tahun) meliputi: anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum, anak yang mengikuti proses

peradilan, anak yang berstatus diversi, anak yang telah menjalani masa hukuman pidana, dan anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum.

(5). Anak dengan kecacatan (0 – 18 tahun), meliputi: anak dengan kecacatan fisik, anak dengan kecacatan mental dan anak dengan kecacatan ganda.

(6). Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya (6 – 18 tahun), meliputi: anak dalam situasi darurat, anak korban trafficking (perdagangan), anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Persyaratan dan Kewajiban Penerima Manfaat/Layanan. Sasaran penerima layanan PKSA, baik anak, orangtua/keluarga maupun lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra pendamping harus memenuhi persyaratan (conditionalities) sebagai berikut:

(1). Adanya perubahan sikap dan perilaku (fungsi sosial) ke arah positif.

(2). Intensitas kehadiran dalam layanan sosial dasar dari berbagai organisasi/lembaga semakin meningkat.

- (3). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bermitra dengan instansi sosial dalam mendampingi anak sehingga anak dapat terhindar dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.

Kerangka Kerja Konseptual PKSA. Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis keluarga yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial:

- (1). Asesmen masalah dan kebutuhan anak, termasuk orangtua/keluarga dan lingkungan sosial.
- (2). Pendampingan sosial oleh Peksos, TKSA atau Relawan Sosial sampai anak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak, serta semakin berperannya lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (3). Verifikasi/pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam system pengasuhan dan perlindungan orangtua/keluarga, komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial anak, yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak. Komponen Program. PKSA dibagi menjadi 5 komponen utama program, yaitu:

1. Program Kesejahteraan Sosial Anak Batira (PKS-AB)
2. Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar/Jalanan (PKS-Antar/PKS Anjal)

3. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH)
4. Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK)
5. Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK)

PKSA dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat (conditional cash transfer), yang meliputi:

- (1). Bantuan sosial/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2). Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih, rekreasi, ketrampilan dan lain-lain).
- (3). Penguatan dan tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak.
- (4). Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak (Kemensos, RI 2016).

2.4 Konsep Komunitas

Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak". Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. (Soenarno 2002) Definisi Komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Pengertian Komunitas Menurut (Kertajaya Hermawan, 2008), adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values.

Menurut Montagu dan Matson dalam Ambar Sulistiyani, (2004 : 81- 82), terdapat sembilan konsep komunitas yang baik dan empat kompetensi masyarakat, yakni: a) Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasar hubungan pribadi dan hubungan kelompok; b) Komunitas memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola kepentingannya secara bertanggungjawab; c) Memiliki vialibitas, yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri; d) Pemerataan distribusi kekuasaan; e) Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi demi

kepentingan bersama; f) Komunitas memberi makna pada anggota; g) Adanya heterogenitas dan beda pendapat; h) Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan; i) Adanya konflik dan managing conflict. Sedang untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut a) kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas; b) menentukan tujuan yang hendak dicapai dan skala prioritas; c) kemampuan menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai tujuan; d) kemampuan bekerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan. Isbandi Rukminto (2001:71) mengemukakan bahwa sejarah community work di Inggris dapat dibagi menjadi 4 fase :

1. Fase pertama, sejak tahun 1880-an hingga tahun 1920-an adalah fase munculnya pekerjaan sosial (*social work profession*). Ia memberikan contoh mengenai organisasi amal, *the carity organisation society* yang menjadi akar munculnya metode bimbingan sosial perseorangan (*social case work*) di Inggris, terutama dalam upaya mengorganisir dan mengkordinasikan bantuan untuk masyarakat.
2. Fase kedua, berkisar dari tahun 1920-an ke tahun 1950-an yang dicirikan dengan munculnya ide komunitas ataupun wilayah 'rukun tangga' (*neighbourhood*). Hal ini terkait meningkatnya peran pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam pembagian pembangunan perkotaan, dimana titik sentralnya adalah gerakan aksi komunitas.

3. Fase ketiga, berawal sekitar tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, sebagai reaksi atas gagasan komunitas yang berbasis pada 'rukun tangga' yang menjadi basis dari *community work* pada gelombang (fase) kedua.
4. Fase keempat, menurut Isbandi Rukminto (2001:73) merupakan fase dimana para community worker mengembangkan pendekatan-pendekatan yang bersifat radikal dan agak berbau politis, serta memfokuskan aktifitasnya pada gerakan-gerakan sosial yang lebih bersifat khusus. Pendekatan inilah yang banyak terlihat dari pendekatan aksi komunitas yang berkembang saat ini dan memainkan peranan penting pada metode *community work* di Inggris. Istilah Aksi Komunitas ini akhirnya menjadi istilah yang umum untuk menggambarkan partisipasi yang dilakukan melalui konflik antara kelompok komunitas tertentu dengan pihak yang berwenang yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

2.5 Konsep Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Tujuan dari pendidikan adalah agar seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara (2009:81) pendidikan adalah proses menuntun segala

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuju Manusia Merdeka. Yogyakarta. Leutika).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan hal yang paling fundamental dalam mencapai kesejahteraan sosial karena dengan pendidikan, manusia akan belajar untuk mendapatkan kembali fungsi sosialnya. Dengan pendidikan, mindset negatif yang sedari dulu tumbuh pada seseorang yang sama sekali tidak pernah mendapatkan pendidikan akan berubah dan berganti dengan mindset yang baru sehingga tujuan utama pendidikan adalah mengeluarkan seseorang dari belenggu kebodohan menuju terangnya ilmu pengetahuan agar mereka bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera.

Anak jalanan merupakan salah satu kelompok anak yang kurang mendapatkan hak pendidikan secara penuh. Kondisi ekonomi yang lemah serta biaya pendidikan yang semakin mahal membuat anak jalanan jauh dari pendidikan, dan terjerumus kedalam berbagai permasalahan moral dan sosial. Sementara salah satu tujuan dari pada berdirinya negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ini bisa dilihat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka, anak jalanan

sering dihadapkan pada kondisi harus tetap bertahan hidup dengan mencari tambahan ekonomi di jalan, sementara beban serta kerasnya kehidupan di jalan harus tetap mereka jalani. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada anak jalanan seperti permasalahan kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan seharusnya membuka mata setiap element masyarakat maupun pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan sosial mereka. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, hal ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Anak jalanan yang sebagian besar hidupnya berada di jalan, secara simultan terpapar oleh lingkungan jalanan. Lingkungan yang apatis, keras dan eksploitatif hampir selalu dihadapi oleh anak jalanan. Namun dari kehidupan jalanan yang keras pula, anak jalanan menjadi pribadi yang kuat dan berkeinginan keras untuk maju serta memperbaiki kehidupan mereka. Berbagai macam stimulasi dari lingkungan jalanan inilah yang selanjutnya membentuk persepsi anak jalanan tentang situasi pembelajaran (Walgito, 2010:57).